

PROPAGANDA DAN AKIBATNYA PADA MASA PENDUDUKAN JEPANG DI ENREKANG (1942-1945)

PROPAGANDA AND ITS CONSEQUENCES IN JAPANESE DOMAIN IN ENREKANG (1942-1945)

Sahajuddin

Balai Pelestarian Nilai Budaya Sulawesi Selatan
Jalan Sultan Alauddin / Tala Salapang Km. 7 Makassar, 90221
Telepon (0411) 885119, 883748, Faksimile (0411) 865166
Pos-el: saj.sahajuddin@yahoo.com
Handphone: 081342630331

Diterima: 16 Juli 2018; Direvisi: 29 September 2018; Disetujui: 29 November 2019

ABSTRACT

This study reveals and explains the Japanese domain in Enrekang (1942-1945), then reflects on the differences in Japanese domain in South Sulawesi, such as between Makassar and Enrekang and other areas. The method used is the historical method that explains the problem based on historical perspective. The results of the study indicate that the Japanese domain in Enrekang cannot be generally equated with other regions due to the differences of influencing factors. The Japanese domain in Enrekang is unique. In the first year, the Japanese domain in Enrekang still had similarities with other regions in the field of propaganda. But in the following years, the Japanese domain in Enrekang was more emphasized on objects of interest, for example as centers of defense and commodity of cotton and coffee. Japan increasingly acted in Enrekang because it requires a lot of manpower and commodities for war purposes, but at the city level was increasingly softened. In addition, there was a savage act by Japanese army which resulted in a moral collapse and loss of sympathy from the Enrekang people to Japan.

Keywords: *Propaganda, Japanese domain, bunker, hard, and Enrekang.*

ABSTRAK

Kajian ini mengungkapkan dan menjelaskan tentang pendudukan Jepang di Enrekang (1942-1945), kemudian merefleksikan dengan adanya perbedaan pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan, seperti antara kota praja Makassar dengan Enrekang dan daerah-daerah lainnya. Metode yang digunakan adalah metode sejarah yang menjelaskan persoalan berdasarkan perspektif sejarah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendudukan Jepang di Enrekang tidak dapat disamakan secara umum dengan daerah lain karena perbedaan faktor yang mempengaruhi. Pendudukan Jepang di Enrekang memiliki keunikan tersendiri. Pada tahun pertama, pendudukan Jepang di Enrekang masih memiliki kesamaan dengan daerah lain berupa gencarnya propaganda. Namun pada tahun-tahun berikutnya, pendudukan Jepang di Enrekang lebih ditekankan pada objek kepentingan, misalnya sebagai pusat pertahanan dan pusat komoditas daerah dataran tinggi berupa kapas dan kopi. Jepang semakin beraksi di Enrekang karena banyak membutuhkan tenaga dan komoditas untuk kepentingan perang, tetapi di tingkat kota praja semakin melunak. Selain itu, ada tindakan biadab tentara Jepang yang berakibat pada jatuhnya moral dan hilangnya simpati masyarakat Enrekang kepada Jepang.

Kata Kunci: Propaganda, pendudukan Jepang, bunker, keras, dan Enrekang.

PENDAHULUAN

Pendudukan Jepang di Enrekang dan Sulawesi pada umumnya dikuasai oleh Pemerintahan Angkatan Laut (*Kaigun*) Jepang yang dikenal dengan *Minseibu* yang meliputi Kalimantan, Sulawesi dan Seram yang berpusat di Makassar (Kadir. dkk., 1984: 75). Pendudukan di Enrekang sesungguhnya tidak terlalu jauh berbeda dengan pendudukan Jepang daerah lain di Sulawesi Selatan. Artinya, pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan pada umumnya memiliki banyak persamaan. Kalau dilihat dari sistem pemerintahan yang diberlakukan oleh pemerintah pendudukan Jepang, boleh dikata, hampir sama setiap daerah. Pandangan tersebut tidak cukup untuk menjelaskan setiap daerah di Sulawesi Selatan dengan jawaban yang bersifat general sebab setiap daerah dengan etnis, sikap, lingkungan geografis daerah dan sumber daya (sumber daya alam dan sumber daya manusia) yang berbeda akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari tentara pendudukan Jepang. Sebagai ilustrasi pembuktian adalah daerah Enrekang dengan daerah lain, di Enrekang banyak didirikan atau dibangun benteng-benteng pertahanan pada masa pendudukan Jepang yang dikenal dengan *bangker*. Sementara, daerah lain tetap ada, tetapi tidak sebanyak di Enrekang. Hal itu terjadi karena persoalan perbedaan letak wilayah dan geografis yang menjadikan Enrekang sebagai pusat pertahanan, serta perbedaan lainnya.

Pemahaman awal di atas membuka cara pandang dan cara pikir kita untuk semakin yakin bahwa peristiwa setiap daerah pada masa pendudukan Jepang tidak bisa digeneralisasikan, tetapi harus dianalisis dan diberi penjelasan tersendiri untuk menunjukkan perbedaannya. Pandangan inilah yang menjadi salah satu alasan memilih tema di atas untuk dikaji sebab Enrekang memiliki peristiwa yang unik pada masa pendudukan Jepang jika dibandingkan dengan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Pada awal-awal tahun pertama pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan tidak ada konflik-konflik yang berarti antara

pihak tentara Jepang dengan rakyat. Saat itu, Jepang sangat gencar melakukan propaganda dan rakyat Sulawesi Selatan masuk dalam perangkat tersebut, termasuk di Enrekang. Bahkan di Sulawesi Selatan sengaja dibuatkan panitia penyambutan, ibarat menyambut tamu istimewa (Barbara., 1989: 93).

Penyambutan itu pula sebagai wujud keberhasilan propaganda Jepang walaupun di Enrekang tidak ada penyambutan secara khusus. Propaganda Jepang sudah dilakukan sebelum pendudukan dengan cara mendekati dan mempengaruhi golongan nasionalis dan para bangsawan Sulawesi Selatan. Kenyataan itu bukan karena daerah ini tidak memiliki semangat untuk melawan pendudukan Jepang, melainkan sejarah mencatat bahwa daerah ini sangat gigih melakukan perlawanan sejak abad XVII. Kendatipun demikian, Jepang mampu meyakinkan golongan nasionalis dan masyarakat pada umumnya dengan slogan “Jepang-Indonesia sama” untuk mencapai keadilan dan persemakmuran yang sama. Memang harus diakui bahwa daerah ini (Sulawesi Selatan) dan Indonesia Timur pada umumnya secara politik kurang berkembang pada saat Jepang masuk. Pada masa penjajahan Belanda rakyat kurang percaya kepada sekolah yang didirikan dan dibuka pemerintah Hindia Belanda yang berimbas pada dunia politik yang kurang berkembang. Indonesia Timur, khususnya Sulawesi Selatan lebih banyak berkonfrontasi dengan Belanda, kecuali Minahasa dan Ambon, sehingga pada masa pendudukan Jepang masih terlihat dampaknya (Barbara. 1989: 95).

Hal itu tidak berarti bahwa golongan nasionalis Sulawesi Selatan tidak memiliki visi dan misi kemerdekaan. Golongan nasionalis dan rakyat Sulawesi Selatan tetap mengedepankan tujuan kemerdekaan dengan usaha diplomasi sebagaimana yang dilakukan oleh Nadjamuddin Daeng Malewa terhadap Jepang. Sebaliknya, Jepang mampu membaca secara kultural daerah ini yang tidak boleh didekati dengan pendekatan represif tetapi pendekatan persuasif. Itulah

sebabnya propaganda digencarkan di Sulawesi Selatan, dan juga dibentuk dewan-dewan kota praja yang secara kultural dapat mendekati kaum nasionalis atau para bangsawan. Walaupun kekuasaan tidak terletak pada dewan, melainkan pada wali kota, yang pada waktu itu adalah seorang pejabat dari Jepang. Tetapi seiring berjalannya waktu, setelah Jepang terdesak oleh Sekutu dan masih membutuhkan masyarakat lokal, maka jabatan wali kota pun diserahkan kepada orang lokal (Barbara. 1989: 96 dan 101)

Sulawesi Selatan merupakan salah satu daerah yang sangat diperhitungkan dalam pergerakan nasional untuk mencapai kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Tidak sedikit rakyat daerah ini melakukan perjuangan untuk melawan penjajahan, dan bukan hanya dilakukan di daerah ini, melainkan juga mereka berjuang di Jawa. Itulah sebabnya, Soekarno datang di daerah ini untuk melakukan konsolidasi atas perjuangan di daerah hubungannya dengan tingkat pusat (nasional). Sehingga kedatangan Soekarno bersama Soebardjo dan Laksamana Maeda ke Kota Makassar pada April 1945, jangan hanya dimaknai sebagai lemahnya gerakan nasional di daerah ini atau jangan dimaknai karena terbatasnya jumlah pemimpin nasional dalam dewan-dewan daerah dan kota praja, tetapi gerakannya lebih persuasif ketimbang konfrontasi militer. Kedatangan mereka untuk membangkitkan semangat nasionalisme yang sesungguhnya sudah besar di daerah ini, tetapi juga kedatangan mereka untuk mencari dukungan masyarakat dan para tokoh dalam rangkai persiapan PPKI pada 7 Agustus 1945 (Barbara., 1989: 96-97)

Peristiwa yang terjadi di Kota Makassar dan di daerah Enrekang pada masa itu sangat berbeda situasinya. Hal itu dapat dipahami karena di Kota Makassar dilakukan dengan pendekatan terhadap tokoh-tokoh yang dapat mempengaruhi masyarakat. Di daerah Enrekang lebih kepada pemenuhan kebutuhan Jepang dari segi ekonomi ketimbang politis. Kalau

awal tahun pertama banyak persamaannya di semua daerah, tahun kedua dan tahun ketiga pendudukan tidak lagi dapat disamakan antara daerah yang satu dengan daerah lain. Misalnya, tahun kedua (1943) di daerah lain seperti Pinrang tidak banyak mengerahkan tenaga paksa sementara di Enrekang pengerahan tenaga paksa untuk membangun bunker-bunker sangat masif. Pada 1944, daerah lain tidak ada pendirian sekolah militer, sementara di Enrekang ada sebagai pusat atau benteng pertahanan (Natsir. 2012: 78). Termasuk pada awal 1945, di Makassar diangkat wali kota pertama dari kalangan pribumi, yaitu Nadjamuddin Daeng Malewa dan bahkan Jepang sangat lunak memperlakukan rakyat dan kaum nasionalis dengan janji-janji manis, termasuk janji pemberian kemerdekaan Indonesia (Barbara., 1989: 93 dan 101). Di Enrekang semakin parah tindakan tentara Jepang untuk menindas rakyat. Pada masa-masa itu semakin terasa penderitaan yang dialami masyarakat Enrekang.

Kajian atau tulisan tentang pendudukan Jepang di Enrekang telah dilakukan oleh Muhammad Natsir Sitonda yang berjudul *Sejarah Massenrempulu jilid 2*. Pada bagian ketiga tulisan itu, ia menguraikan tentang pendudukan Jepang di Enrekang. Tulisan ini telah memberikan informasi awal terkait dengan pendudukan Jepang di Enrekang, tetapi informasinya masih sangat terbatas pada kehidupan masyarakat Enrekang pada masa itu. Sementara hal-hal lain yang diuraikan dalam buku ini adalah uraian-uraian yang bersifat umum tentang pendudukan Jepang di Indonesia dan Sulawesi Selatan khususnya. Tetapi tulisan itu yang menjadi alasan pula untuk menggali lebih jauh informasi atau kisah dari peristiwa pendudukan Jepang di Enrekang. Sebab di daerah ini banyak mengungkap tentang propaganda Jepang selama berkuasa. Termasuk masalah perlakuan biadab tentara Jepang terhadap perempuan di Enrekang, yang dalam tulisan Natsir tidak disinggung.

Sebelum Jepang datang ke Indonesia sebagai penjajah, Jepang telah melakukan

serangkaian usaha-usaha untuk menarik simpati orang Indonesia. Salah satu kajian dalam bentuk skripsi menguraikan bahwa para tokoh pergerakan Indonesia pernah diundang ke Jepang, baik pergerakan nasional maupun pergerakan Islam. Sebaliknya, bahwa pada masa pergerakan nasional, banyak orang Jepang mencari nafkah di Hindia Belanda (Indonesia) sebagai pedagang, mereka dikenal sebagai tuan-tuan toko. Sikap mereka terhadap orang-orang Indonesia sangat ramah sehingga mereka mendapat simpati dari masyarakat. Orang-orang Jepang juga banyak datang pada masa depresi ekonomi tahun 1929, bahkan jauh kebelakang, khususnya pada abad XVII di Batavia sudah terdapat 30 orang Jepang yang terlibat dalam perniagaan bahari (Widiatmoko. 2010:4 dan 38). Kemudian hal senada juga diuraikan dalam kajian Edward L. Poelinggomang bahwa di Sulawesi Selatan juga telah banyak orang-orang Jepang sebelum pendudukan yang berprofesi sebagai tuan toko, dan sangat baik memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, setelah pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan khususnya, banyak yang mensinyalir bahwa para tuan-tuan toko itu adalah bagian dari strategi intelejen pemerintah Jepang untuk menarik simpati rakyat (Poelinggomang, dkk. 2005:85).

Tulisan-tulisan yang ada di tempat lain hanya menyinggung secara sepintas mengenai pendudukan Jepang di Enrekang. Tulisan yang dimaksud dan menginspirasi kajian ini adalah Barbara Sillars Harvey tentang Pemberontakan Kahar Muzakkar dari Tradisi ke DI/TII. Pada bagian ketiga tulisan ini, menguraikan Pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan; Harun Kadir, dkk. tentang Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia di Sulawesi Selatan (1945-1950). Pada bab 3 tulisan ini, juga menguraikan tentang Pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan; termasuk tulisan Edward L. Poelinggomang, dkk. Tentang Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2. Pada bab 5 dan 6 tulisan ini menguraikan tentang pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan. Semua tulisan tersebut

tidak membicarakan pendudukan Jepang di Enrekang, tetapi tulisan itu menginspirasi pentingnya kajian ini dilakukan di Enrekang.

Pendudukan Jepang di Enrekang dapat dianggap cukup berhasil, baik masalah propagandanya pada saat Jepang masuk, maupun masalah kebijakannya dalam berbagai bidang, termasuk penetrasinya yang menyebabkan rakyat tidak melakukan perlawanan. Namun sebaliknya, masyarakat Enrekang menyisahkan berbagai macam dampak ekonomi, sosial-budaya, dan termasuk politik pemerintahan. Dampak ekonomi menjadi tergerus produktivitasnya karena para penduduk tidak berani bertani. Banyak di antara mereka menyerahkan tenaganya ke pemerintah pendudukan Jepang ketimbang kepentingan keluarganya karena takut disiksa. Sementara dampak sosial-budayanya lebih kepada dekadensi hubungan sosial karena aktivitas sosial-budaya sangat dibatasi, walaupun pada awal-awal keberadaan Jepang bersifat persuasif, memasuki tahun kedua sudah represif. Demikian juga, yang terkait dengan persoalan politik menjadi mandul karena politik lokal tidak diberi ruang gerak sesuai dengan sistem pemerintahan daerahnya. Hal itulah yang kami anggap penting untuk dikaji dan dijelaskan, seperti apa dan bagaimana pendudukan Jepang di Enrekang. Pada bagian pembahasan kajian ini akan diuraikan tentang propaganda Jepang yang menyebabkan mereka sangat mudah diterima oleh masyarakat Enrekang, walaupun propaganda itu diikuti tindakan represif; kebijakan dan tindakan Jepang dalam banyak hal sebagai cara untuk mempertahankan diri serta akibat pendudukan dan sikap masyarakat.

METODE

Mengungkapkan dan menjelaskan masa pendudukan Jepang di Enrekang, kajian ini mempergunakan metode studi pustaka dan studi lapangan melalui wawancara. Adapun langkah-langkah penelitian sejarah pada umumnya (Cottschalk, 1985:27) adalah:

heuristik, yaitu mencari dan mengumpulkan data-data atau sumber-sumber yang berkaitan dengan pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya dan Enrekang khususnya. Proses heuristik di lapangan sangat terbatas mendapatkan informan yang sezaman dengan pendudukan Jepang; kritik sumber, artinya bahwa tidak semua sumber yang berkaitan dengan objek penelitian akan dipergunakan sebagai data analisis, tetapi diseleksi melalui kritik sumber; interpretasi. Interpretasi dalam kajian ini, lebih kepada penjelasan dan analisa sumber oleh penulis, khususnya menjelaskan hasil olahan data FGD; dan historiografi, sering diartikan sejarah penulisan sejarah secara luas sebagai suatu kesatuan dari proses rekonstruksi (Kartodirdjo, 1985: 9).

PEMBAHASAN

Masuknya Jepang dan Reaksi Masyarakat Enrekang

Keberadaan orang Jepang di Indonesia pada masa Hindia Belanda memperlihatkan keseriusan Jepang untuk menguasai Indonesia sebagai negara yang sangat kaya. Hipotesa itu tidaklah berlebihan, karena arus emigran Jepang semakin meningkat dari abad ke abad. Kalau abad XVII hanya mencapai 30 orang, memasuki abad XX telah mencapai ribuan orang. Emigran Jepang memang meningkat tajam ke Hindia Belanda pada awal abad XX, gelombang kedatangan terbagi dua fase: pertama, terjadi pada awal pemerintahan Meiji (tahun 1868) sampai akhir tahun 1910-an, prostitusi merupakan mayoritas kegiatan orang Jepang, terutama ke Jawa; fase kedua, awal tahun 1910-an sampai 1930-an yang mayoritas kegiatan orang Jepang adalah pemilik toko. Emigran ini meningkat terus, tercatat bulan November 1920 jumlah emigran Jepang di Hindia Belanda sudah mencapai 4.148 orang dan menjadi 6.600 orang pada tahun 1939 (Widiatmoko, 2010:40)

Terkait dengan strategi pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia, pemerintah

Jepang membentuk suatu departemen propaganda yang disebut *Sendembu* (Departemen Propaganda) yang memiliki tugas dan fungsi untuk mempengaruhi dan meyakinkan rakyat Indonesia (Widiatmoko, 2010:7). Menjelang kedatangan pendudukan Jepang, departemen ini juga memanfaatkan ramalan Jayabaya yang mengisukan akan datangnya juru selamat berkulit kuning. Apalagi masyarakat Sulawesi Selatan sejak *To Manurung* abad abad XIII banyak yang percaya terhadap mesianisme. Setelah kemenangan tentara Jepang terhadap pangkalan Angkatan Laut Amerika Serikat yang terbesar di Pasifik, yaitu di Pearl Harbour, Philipina, semakin meyakinkan orang Indonesia bahwa ramalan Jayabaya itu telah datang, dan yang dimaksud berkulit kuning adalah Jepang. Setelah Jepang masuk di Indonesia, dikeluarkan lagi propaganda dengan motto baru “Persatuan Asia” serta membakar semangat rakyat untuk melakukan perlawanan dan menanamkan anti Barat. Selain itu mendirikan organisasi tiga “A”, yang terkenal dengan somboyan “Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia (baca Poelinggomang, dkk. 2005:82-87).

Keberadaan (pendudukan) Jepang di Indonesia menjadi alasan kuat untuk menguasai dan menduduki pangkalan militer terbesar Amerika Serikat di Pasifik, yaitu Pearl Harbour, Philipina dengan beberapa pertimbangan: pertama, Indonesia sangat kaya akan bahan mentah seperti minyak bumi, batu bara, dan lain-lain; kedua, Indonesia kaya akan hasil pertanian dan perkebunan seperti karet, beras, kapas, jagung, rempah-rempah yang sangat dibutuhkan pemerintah militer Jepang dalam peperangan dan; ketiga, Indonesia memiliki tenaga manusia yang banyak jumlahnya dan murah harganya, bahkan tidak dibayar untuk dipergunakan dalam banyak keperluan, termasuk membantu melancarkan perang untuk memenangkan perang Asia Timur Raya. Sementara Jepang, wilayahnya sangat sempit dan bergunung-gunung yang kurang

cocok dengan lahan pertanian. Demikian pula, persoalan demografi Jepang pasca politik isolasinya mengalami pertambahan penduduk yang berimbas pada emigrasi sebagai jalan keluarnya dan militerisme sebagai pemberi jalan (Poelinggomang. dkk. 2005:82)

Sebelum Jepang menduduki Indonesia, Jepang telah mengirim utusan kepada pemerintah Hindia Belanda pada awal 1941. Nota yang dibawa oleh Kobayashi (utusan Jepang) dari pemerintah Jepang berisi permohonan agar pihak Jepang diberi fasilitas-fasilitas terutama (1) mengizinkan emigran Jepang ke Kalimantan, Sumatera, dan Kepulauan Nusatenggara; (2) memberikan izin kepada pihak Jepang konsesi untuk membuka jalan-jalan kereta api, pelabuhan-pelabuhan yang penting, serta mendirikan perusahaan-perusahaan. Namun, permohonan Jepang itu ditolak oleh pemerintah Hindia Belanda (Poelinggomang. dkk. 2005:83). Adanya utusan Jepang tersebut, menunjukkan bahwa Jepang sudah mempersiapkan diri dan telah meyakini kemampuan kekuatan dirinya dengan kekuatan pemerintah Hindia Belanda. Dapat juga dipahami bahwa isi nota tersebut semakin memperjelas bahwa Jepang punya ambisi untuk melakukan migrasi ke Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama. Kemudian migrasi itu telah mengembang tugas kenegaraan sebagai propaganda. Propaganda itu dianggap sangat berhasil di Sulawesi Selatan sebelum masa pendudukan Jepang, sehingga pada saat Jepang telah berkuasa, Jepang tidak terlalu gencar lagi melakukan propaganda di Sulawesi Selatan dibandingkan di Jawa (Barbara. 1989: 98)

Keberhasilan propagandan Jepang di Sulawesi Selatan juga ditunjukkan oleh golongan nasionalis. Kaum nasionalis di daerah ini malah membentuk suatu panitia untuk menyambut pasukan Jepang yang bertajuk Panitia Keamanan Umum (*Chian Iji Kai*). Tujuan panitia penyambutan ini adalah untuk memelihara ketertiban dan mengganti para pejabat Belanda yang ditawan oleh Jepang. Hal ini juga menandakan bahwa memang antara

Jepang dengan golongan nasionalis Sulawesi Selatan sudah ada pembicaraan sebelumnya. Akan tetapi Belanda tidak berani melakukan perlawanan secara frontal karena rakyat Sulawesi Selatan berada di pihak Jepang. Yang menjadi ketua panitia pada waktu itu adalah Nadjamoeddin Daeng Malewa. Ia pernah menjadi anggota partai Parindra dan juga pendiri partai Persatuan Selebes Selatan. Ia dipercaya oleh Jepang karena dianggap bersikap kooperatif kepada orang Jepang tetapi lembaga ini dibuburkan dan diganti dengan Departemen Pemerintahan Sipil Angkatan Laut pada 10 Maret 1942 (Barbara., 1989: 93)

Menguasai Sulawesi Selatan dan Indonesia pada umumnya, Jepang terlebih dahulu menginfasi dan menguasai daerah-daerah yang dianggap vital secara ekonomi dan politik. Secara ekonomi khususnya sumber daya alam, negara Jepang sangat terbatas, namun yang ada adalah teknologi dan produktivitasnya, sehingga membutuhkan bahan baku dan pangsa pasar. Untuk dapat memenuhi harapan itu, Indonesia paling memenuhi syarat di kawasan Asia Tenggara. Itulah sebabnya, permulaan tahun 1942, tentara Jepang mulai bergerak kearah Selatan setelah menguasai Pearl Harbour dan berusaha menduduki wilayah Hindia Belanda (Indonesia). Salah satu wilayah yang diincar oleh Jepang adalah Pulau Kalimantan.

Tanggal 10 Januari 1942, tentara Jepang telah berhasil menduduki Tarakan (Kalimantan Timur) dan berhasil memaksa pihak Belanda untuk menyerahkan kekuasaannya pada 13 Januari 1942. Hanya dalam tempo kurang lebih satu bulan seluruh Kalimantan berhasil dikuasai. Jadi, tercatat sejak 10 Januari sampai 10 Februari 1942 wilayah Kalimantan dan sekitarnya dapat direbut. Wilayah ini sangat dibutuhkan oleh Jepang untuk memenuhi kebutuhan minyaknya dalam Perang Pasifik dan Perang Dunia II. Selain keperluan perang, Jepang membutuhkan bahan baku untuk industrinya. Kalimantan pada masa Hindia Belanda tercatat sebagai daerah penghasil minyak kedua setelah Riau

dan Palembang di Indonesia (Kartodirdjo, dkk. 1977; Barbara. 1989:95).

Sementara Sulawesi pada umumnya dan khususnya Sulawesi Selatan juga diinfasi oleh Jepang dalam waktu hampir bersamaan dengan penyerangan ke Kalimantan dengan pasukan yang berbeda. Untuk menduduki Sulawesi Selatan, tentara Jepang mulai menyusup dari utara dan bergerak ke arah selatan, Kota Manado yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi pada 11 Januari 1942 berhasil dikuasai (Kadir. dkk. 1984: 69). Sulawesi Utara ini berbatasan langsung dengan negara Philipina sebagai pusat pertahanan Angkatan Laut Sekutu (Amerika Serikat) Pearl Harbour yang berhasil diporakporandakan oleh pasukan Jepang. Jadi untuk menguasai Sulawesi, dianggap wajar jika memulai dari sebelah utara, kemudian bergerak ke selatan, yaitu Kendari. Kendari juga menjadi sasaran infasi Jepang karena Kendari dianggap dapat mengancam kedudukan pasukan Jepang jika dibiarkan, di sekitar bandara Kendari ini ada pangkalan militer Belanda dan Amerika Serikat (Natsir. 2012: 66-67). Bandara inilah yang menjadi sasaran Jepang dan berhasil dikuasai pada 24 Januari 1942.

Setelah Jepang menguasai Kendari, Jepang terus bergerak ke selatan, yaitu Sulawesi Selatan. Sesungguhnya Sulawesi Selatan yang paling vital untuk dikuasai, tetapi Jepang tidak mungkin melakukan itu tanpa menguasai daerah-daerah di sekitarnya terlebih dahulu. Penguasaan Sulawesi Selatan untuk kepentingan ekonomi Jepang, tidaklah terlalu menjanjikan dibanding dengan Pulau Kalimantan. Akan tetapi Sulawesi Selatan ini secara geografis yang dianggap paling strategis untuk wilayah Indonesia Timur. Sulawesi Selatan juga memiliki sarana dan prasarana yang lebih lengkap jika dibandingkan daerah lain di Indonesia Timur pada umumnya. Selain itu, di Sulawesi Selatan, tepatnya di Kota Makassar sebagai kota pelabuhan transito dunia sejak masa kerajaan abad XVII yang masih eksis sampai saat itu. Sehingga pelabuhan ini sangat dibutuhkan oleh Jepang untuk bongkar

muat barang dan pasukan. Untuk dapat menguasai Sulawesi Selatan, khususnya pusat pemerintahan Hindia Belanda di Kota Makassar, Jepang memiliki perhitungan tersendiri dari segi keamanan pasukannya (Ricklesf. 1995: 187).

Jepang tidak langsung menduduki Kota Makassar, tetapi terlebih dahulu menguasai Sinjai karena pasukan Angkatan Laut Jepang menilai Sinjai yang paling aman untuk mendaratkan pasukan dibanding dengan pelabuhan lain, termasuk Bajoe, Bone. Langkah yang diambil oleh Jepang ini, bukanlah langkah yang baru muncul atau kebijakan yang secara tiba-tiba, tetapi Jepang sudah lama melakukan pemantauan. Demikian pula ketika Tentara Angkatan Laut Jepang berhasil menguasai Sinjai pada 9 Februari 1942, dan sehari kemudian barulah Kota Makassar menjadi sasaran. Lagi-lagi Jepang masih sangat hati-hati untuk tidak langsung menginfasi Kota Makassar pada 10 Februari 1942. Akan tetapi terlebih dahulu Angkatan Laut Jepang didaratkan di Barombong. Dari sanalah, mereka secara cepat menduduki Kota Makassar untuk tidak memberi kesempatan pasukan Belanda mempersiapkan diri. Lagi pula jarak antara Barombong dengan Kota Makassar hanya kurang lebih 10 km sebelah Selatan Kota Makassar.

Setelah Jepang berhasil menduduki Kota Makassar, di kota ini hanya ada sedikit perlawanan terhadap pendaratan Jepang, baik dari pihak garnisun militer Belanda maupun penduduk setempat (Barbara. 1989: 92). Malahan, penduduk dan kaum nasionalis kota ini memberikan penyambutan yang meriah kepada tentara Jepang dengan membentuk kepanitiaan secara khusus. Adanya kerja sama antara golongan nasionalis dengan pihak Jepang yang menyebabkan Belanda tidak melakukan perlawanan. Kemudian setelah menguasai Kota Makassar, pasukan Jepang mendesak pihak Belanda untuk menyerahkan kekuasaannya sambil menyerang pusat-pusat pertahanan Belanda yang berada di daerah-

daerah. Walaupun terjadi perlawanan dari Belanda, usaha perlawanan yang dilancarkan oleh pihak Belanda tidak ada manfaatnya. Pasukan Belanda semakin terdesak sampai jantung pertahanan Belanda di Maros, tetapi itu pun sangat gampang dikuasai oleh Jepang. Bahkan Belanda semakin terdesak hingga pada pertahanan terakhirnya di Enrekang. Di mana pihak Belanda terpaksa menyerah kalah (Poelinggomang, dkk. 2005:83; Sritimuryati. 2013: 41; Natsir. 2012: 68). Akibatnya seluruh Sulawesi Selatan dapat diduduki dan dikuasai oleh pihak Angkatan Laut Jepang.

Khusus daerah Enrekang, tentara Jepang pertama mendarat pada Februari 1942, setelah Jepang dapat merebut benteng pertahanan Belanda yang berada di Kampung Kotu, Mendatte dan Bambapuang, tentara Jepang kembali lagi ke Makassar (Dian. 1991: 30). Kemudian pada akhir 1942, datanglah kembali tentara Jepang di daerah ini di bawah pimpinan Tapio Kokuda (Sritimuryati. 2013: 41). Kedatangan tentara Jepang tersebut, seperti halnya di daerah-daerah lain di Sulawesi Selatan, umumnya disambut baik oleh masyarakat, tidak terkecuali masyarakat di daerah Enrekang. Sambutan yang baik itu dilatarbelakangi oleh anggapan masyarakat bahwa tentara Jepang sebagai penyelamat bagi mereka dari penjajahan Belanda.

Masa Pendudukan Jepang di Sulawesi Selatan, dan Enrekang sebagai salah satu daerah yang harus dikuasai dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan utama adalah menjadikan Enrekang sebagai benteng pertahanan sebagaimana pada masa Hindia Belanda. Setelah penulis melakukan penelitian secara singkat, kemudian mengunjungi wilayah Enrekang, khususnya daerah-daerah yang dijadikan benteng pertahanan, seperti di Kampung Kotu, Mendatte, dan Bambapuang, termasuk Anggeraja, daerah-daerah ini memiliki banyak bangker-bangker yang dibuat pada masa Pendudukan Jepang. Kemudian melakukan wawancara dengan beberapa tokoh masyarakat selama penelitian, lalu dihubungkan

dengan data-data pustaka yang diperoleh, dapat dikatakan bahwa Enrekang sangat wajar dijadikan sebagai benteng pertahanan dengan beberapa alasan menurut penulis yang diolah dari hasil FGD. Alasan pertama dilihat pada letak geografis Enrekang yang berada di daerah perbukitan, dan lingkungan sekitarnya adalah gunung, hutan, tebing, juran yang dalam, dan pengairan sungai; Alasan kedua dapat dilihat dari segi produktifitas Enrekang pada masa kerajaan, Enrekang memiliki sumber daya alam pegunungan yang menghasilkan kapas, merica, kopi dan lain-lain yang juga dibutuhkan oleh pihak penjajah pada masa itu; Ketiga adalah dari segi geopolitik Enrekang memiliki hubungan secara kewilayahan dengan kerajaan lain yang ada di sekitarnya, seperti Kerajaan Luwu, Toraja, Sidenreng Rappang, Sawitto dan lain-lain; dan alasan keempat, terkait dengan sosiokultural Enrekang yang dalam sejarahnya tidak terlalu mempersoalkan kehadiran kerajaan-kerajaan lain maupun bangsa asing yang ada di daerahnya sepanjang tidak mengintervensi kepribadian orang Massenrenpulu (Hasil olahan data FGD, 14 Agustus 2018).

Kebijakan dan Tindakan Jepang

Keberhasilan propaganda Jepang dapat dilihat dengan tidak adanya perlawanan terhadap tentara Pendudukan Jepang sejak awal kedatangannya, walaupun propaganda tidak hanya terjadi di Enrekang, tetapi di Enrekang pada masa itu tidak ada perlawanan. Keadaan itu tidak muncul begitu saja, tetapi dipastikan ada alasan-alasan sebelumnya, yaitu propaganda dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh Jepang melalui tuan-tuan toko. Jepang berhasil mendekati kaum nasionalis dan sebagian para bangsawan, itulah sebabnya golongan nasionalis membentuk kepanitiaan penyambutan tentara Pendudukan Jepang sebagaimana disebutkan di atas. Adanya kepanitiaan penyambutan, susah untuk tidak mengakui propaganda Jepang berhasil sejak awal kedatangannya di Sulawesi Selatan sebagaimana pernyataan Barbara Sillars Harvey

bahwa tidak ada propaganda di Sulawesi Selatan (Barbara. 1989:92-95). Tahun-tahun pertama Pendudukan Jepang di daerah Enrekang, tentara Jepang terus-menerus melancarkan propaganda tentang maksud-maksud baik pemerintah Jepang untuk kemakmuran bersama di Asia Timur Raya, dengan suatu slogan “Nippon-Indonesia sama-sama”. Tentara Jepang berusaha menarik simpati masyarakat Enrekang. Tentara Jepang berperilaku baik dan bersikap akrab kepada semua orang yang mereka temui. Mereka sengaja berperilaku seperti itu, mereka juga berusaha agar dapat memperhatikan dan mengamati masyarakat Enrekang secara dekat, termasuk sosial budaya dan ekonominya. Setelah mengamati dan memahami masyarakat Enrekang, Jepang mengambil suatu kesimpulan bahwa masyarakatnya masih berada dalam suasana kemiskinan yang diwariskan dari pemerintahan Hindia Belanda (Hasil olahan data FGD, 14 Agustus 2018).

Jepang melihat keadaan penduduk yang miskin dan jarang menikmati makanan mewah berdasarkan ukuran setempat. Terlebih lagi, masyarakat yang berada di daerah pegunungan yang kurang produktif akibat penjajahan Belanda (sengaja menyalahkan Belanda). Keadaan yang sangat miskin itu, Jepang dengan cepat berusaha mengambil hati masyarakat Enrekang dengan cara membagi-bagikan makanan, diantaranya gula pasir, susu, sabun, dan lain sebagainya (Sritimuryati. 2013: 41). Menurut pengakuan beberapa orang dalam FGD, bahwa pada masa itu, makanan-makanan tersebut di atas tidak pernah dinikmati oleh atau dipakai masyarakat setempat pada masa pemerintahan Hindia Belanda sehingga tindakan dan sikap Jepang itu mengundang decap kagum masyarakat. Tidak sedikit anggota masyarakat datang hanya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pendudukan Jepang (Hasil olahan data FGD, 14 Agustus 2018).

Selain masalah makanan yang dipakai untuk menarik simpati masyarakat Enrekang, Jepang juga mampu menyakinkan masyarakat dalam bidang politik pemerintahan. Pada masa

pemerintahan Jepang di daerah Enrekang, semua kegiatan-kegiatan pemerintahan Belanda tidak mengalami perubahan tatanan dalam masyarakat. Juga tidak ada pergantian pejabat pada tahun pertama pendudukan Jepang di Enrekang, sehingga pejabat-pejabat lokal yang dipakai pada masa pemerintahan Hindia Belanda tetap menjalankan tugasnya pada masa pemerintahan Jepang. Demikian juga pengibaran bendera kebangsaan Indonesia Merah Putih diizinkan dikibarkan bersamaan dengan bendera nasional Jepang. Termasuk lagu Indonesia Raya dinyanyikan bersama dengan lagu kebangsaan Jepang “*Kimigayo*” sehingga betul-betul sangat percaya bahwa Jepang ingin memerdekakan Indonesia dengan slogan “Indonesia-Jepang sama-sama” (Hasil olahan data FGD, 14 Agustus 2018).

Sikap baik Jepang itu diikuti oleh kebijakan-kebijakan yang bersifat umum secara nasional dengan mengeluarkan undang-undang yang mengatur kehidupan sosial politik Indonesia. Kebijakan itu mulai dilakukan sejak ditandatangani Kapitulasi Kalijati pada 8 Maret 1942, antara pemerintah Hindia Belanda yang diwakili oleh Letnan Jenderal H. Ter Poorten dan pemerintah Kekaisaran Jepang yang diwakili oleh Jenderal Hitoshi Imamura (Djoened. dkk. 1990: 5). Pada saat itulah pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyerah tanpa syarat kepada pemerintah pendudukan Jepang. Akibat kekalahan pemerintah Hindia Belanda itu, secara resmi pula pemerintah Kekaisaran Jepang menguasai Indonesia. Wilayah Indonesia dibagi dalam tiga wilayah pemerintahan, yaitu: (1) Jawa dan Madura berada dalam pengawasan kekuasaan pemerintah Bala Tentara Jepang ke-16 yang berkedudukan di Jakarta; (2) Sumatera berada dalam pengawasan pemerintahan Bala Tentara Jepang ke-25 yang berkedudukan di Bukit Tinggi; dan (3) Kepulauan-kepulauan lain di Indonesia, berada dalam pemerintahan Angkatan Laut (*Kaigun*) Jepang yang berkedudukan di Makassar (Soejiti. 1982: 108). Pemerintah pendudukan Jepang dengan cepat mengambil langkah-langkah strategis setelah

mengeluarkan UU No.1 pada 7 Maret 1942 yang terdiri atas enam pasal. Pendudukan Jepang dilaksanakan oleh kepala staf yang disebut *Guenseikan* dengan membawahi departemen-departemen (*bu*) yang terdiri atas *Somubu* (Departemen Urusan Umum), *Naimubu* (Departemen Dalam Negeri), *Sangyobu* (Departemen Perekonomian), *Zeimubu* (Departemen Keuangan), *Shidobu* (Departemen Kehakiman), *Keimubu* (Departemen Kopolisian), *Kotsubu* (Departemen Lalu Lintas), dan *Sendembuatau* Departemen Propaganda (Widiatmoko. 2010:2) Kalau diperhatikan secara seksama isi Undang-Undang No.1 Jepang yang dikeluarkan pada 7 Maret 1942 memang terlihat baik. Pasal satu membicarakan perbaikan nasib rakyat, baik Nippon maupun Indonesia secara bersama-sama; pasal 2 pemerintah Bala Tentara Jepang memegang kekuasaan tertinggi; pasal 3 semua badan-badan pemerintahan dan kekuasaan tetap diakui sah; pasal 4 terdiri dari 4 ayat pertama, semua pegawai harus menuruti perintah Bala Tentara Nippon dan pembesar pemerintahan, ayat dua, Bala Tentara Nippon akan menghormati kedudukan dan kekuasaan pegawai, termasuk harta bendanya dan agamanya, ayat tiga, harus mempercayai Bala Tentara Nippon, ayat keempat, barang siapa yang melanggar dan menghalang-halangi pekerjaan militer akan ditindak berdasarkan hukum militer; pasal 5, uang Nippon yang dipakai sebagai rupiah; pasal 6, UU mulai berlaku semanjak diumumkan (Kadir. dkk. 1984: 71- 72)

Sementara itu, daerah Sulawesi Selatan pada masa pendudukan Jepang dibagi menjadi enam wilayah administrasi yang dikenal dengan term bahasa Jepang, yaitu Kenkanrikan (Kadir. dkk. 1984: 76; Peolinggomang. dkk. 2005: 90-91). Berdasarkan pembagian wilayah yang dimaksud tersebut, Daerah Enrekang masuk ke dalam Kenkanrikan Pare-Pare. Jadi, pada masa Pendudukan Jepang di daerah Enrekang di bidang pemerintahan yang sebelumnya dipegang oleh Belanda tidak mengalami perubahan dan tetap dipakai, kecuali namanya yang diubah yakni dari *Landschap* (Belanda) menjadi *Soetjoo*

(Jepang) di bawah *Bunken* Enrekang. Sejak awal tahun pertama berkuasa, masyarakat Enrekang tetap diberi wewenang untuk memerintah dalam urusan keagamaan, tentara Jepang tidak mencampurinya, kecuali dalam urusan ekonomi. Hal ini dilakukan oleh tentara Jepang agar dapat bertahan sampai yang mereka cita-citakan dapat tercapai. Bahkan, pihak Jepang pada waktu terdesak pasukannya pun masih berusaha menarik simpati rakyat. Misalnya, dalam bidang keagamaan, Jepang mendatangkan orang Jepang yang seagama seperti Haji Umar Faisal, Pendeta Miahira untuk Protestan dan Katolik adalah Aloysius Ogihara ke Sulawesi Selatan (Kadir. dkk. 1984: 77)

Seiring dengan perkembangan waktu, sistem pemerintahan Pendudukan Jepang juga mengalami perubahan. Demikian juga strategi propaganda dan pengaruh Jepang mengalami perubahan sesuai dengan kebutuhan Jepang. Memasuki tahun kedua, pendudukan Jepang berusaha untuk tetap mendapat dukungan dari rakyat Indonesia, tetapi pada sisi lain kepentingan Jepang tetap yang diutamakan. Sebagai contoh, pada pertengahan 1943, Jepang sudah mulai terdesak oleh serangan dari Sekutu di Asia Tenggara. Untuk menarik simpati rakyat, pemerintah pendudukan Jepang memberikan janji kemerdekaan untuk Indonesia dikemudian hari. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Jepang, Tojo di lapangan Ikada pada 7 Juli 1943 sebagai keputusan sidang Parlemen Jepang (*Teikoku Gikai*) yang ke-82. Juga mengajak rakyat Indonesia mengambil bagian dalam pemerintahan. Untuk Sulawesi Selatan, beberapa bulan kemudian dibentuk Badan Pertimbangan Keresidenan, yaitu pada awal 1944 yang beranggotakan 15 orang. 12 orang bangsawan dan 3 anggota kehormatan, yaitu 3 kerajaan besar, yakni Kerajaan Gowa, Luwu, dan Kerajaan Bone (Kadir. dkk. 1984: 80). Untuk meyakinkan rakyat Indonesia, pengumuman pemberian janji kemerdekaan itu dan propaganda lainnya dilakukan melalui radio bahwa Jepang adalah pembela Asia, Jepang merasa berkewajiban memerdekakan

Asia dari penindasan dan penjajahan bangsa-bangsa kulit putih, yakni Inggris, Amerika, dan Belanda (Kadir. dkk. 1984: 71)

Sementara di Enrekang memasuki 1943, Jepang sangat gencar melakukan pembangunan bunker-bunker untuk pertahanan pasukan Jepang dengan mengerahkan tenaga paksa yang ada di Enrekang. Secara singkat dapat dipahami di sekitar bunker-bunker pertahanan dilakukan pelatihan militer yang melibatkan masyarakat setempat. Pengerahan tenaga paksa, mengerjakan lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan para penjajah (pendudukan Jepang), khususnya penanaman kapas (Manta, wawancara, 12 Agustus 2018). Pada 1944, tentara Jepang mendirikan sekolah militer di Anggeraja daerah Enrekang, yaitu di Kampung Carruk kurang lebih 18 km dari ibukota Kabupaten Enrekang. Pendirian sekolah militer ini karena Jepang semakin terdesak oleh pasukan Sekutu, sementara pasukan Jepang sangat terbatas untuk menghadapi gempuran tentara Sekutu yang semakin mendekat masuk ke Indonesia. Jadi, tujuan sekolah militer ini adalah untuk menggembleng pemuda-pemuda Enrekang dalam rangka menghadapi tekanan-tekanan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Murid-murid sekolah ini terdiri atas pemuda-pemuda yang berusia 15 tahun ke atas, juga diikuti dalam barisan *Seinendan* (latihan pertahanan rakyat), sedangkan yang berumur 14 tahun ke bawah ikut dalam barisan *Seinenku Rencho*. Barisan pertahanan rakyat lainnya yang dibentuk oleh pasukan tentara Jepang adalah *Keibodan*, yaitu barisan bantuan kepolisian, *Suisintai* yaitu barisan pelopor yang bertugas memelopori pertahanan wilayah dari serangan Sekutu, termasuk *Heiho* yaitu barisan bantuan Angkatan Darat Jepang, termasuk Angkatan Lautnya (Natsir. 2012: 78).

Murid-murid yang dihimpun dalam pendidikan ini pada dasarnya akan dijadikan tentara pembantu Jepang sebagai pasukan berani mati (*Jabakutai*). Setelah Jepang meninggalkan daerah ini, maka barisan-barisan inilah yang banyak melahirkan laskar dan tentara di daerah

Enrekang. Para pemuda di dalam menjalankan pendidikannya selain mendapat latihan kemiliteran, juga dipompakan semangatnya anti Inggris dan anti Amerika Serikat lewat nyanyian-nyanyian: “Awat Inggris dan Amerika, mereka musuh bagi Asia; sehingga Inggris harus dilinggis, dan Amerika Serikat harus disetrika”. Sekolah-sekolah militer yang didirikan oleh tentara Jepang di Carruk, daerah Enrekang, tidak hanya pemuda yang berasal dari Enrekang, tetapi juga dapat diikuti oleh utusan-utusan dari: Luwu, Toraja, Sidrap dan Pare-Pare. Setelah mereka tamat dari pendidikan ini, mereka harus kembali ke daerahnya masing-masing untuk mengikuti kegiatan tentara Jepang yang ada di daerah tersebut. Adapun hasil atau tamatan dari sekolah latihan militer di Carruk, Enrekang adalah Uwak Gading, Uwak Tapak, Ambe Teppo, Pung Senga, Matta dan sebagainya. Kemudian nama-nama tersebut menjadi pejuang revolusi kemerdekaan Indonesia nantinya, khususnya untuk wilayah Enrekang dan Sulawesi Selatan pada umumnya (Natsir. 2012: 77).

Perubahan lain yang dilakukan oleh pendudukan Jepang adalah perubahan slogan propagandanya. Salah satu slogan yang dimaksud adalah “Nippon-Indonesia sama” diubah menjadi “Nippon saudara tua, dan Indonesia saudara muda”. Saudara tua wajib membimbing yang masih muda. Karena itu, rakyat Indonesia harus merasa satu keluarga dengan Jepang (Kadir. dkk. 1984: 73,76,77). Perubahan itu dapat dimaknai sebagai langkah strategi Jepang yang bermakna ganda, pertama bahwa Jepang harus dianggap sebagai saudara tua, bersaudara itu kadang terjadi perbedaan dan konflik-konflik sehingga jangan diambil hati karena kita bersaudara; kedua adalah mengisyaratkan pentingnya saudara tua mengambil tindakan sebagai bentuk perhatian dan bimbingan saudara tua ke saudara mudanya.

Akibat Pendudukan dan Sikap Masyarakat

Pada awal 1944, kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh tentara Jepang kepada masyarakat Kota Makassar mulai melunak, tetapi di Enrekang, bukan menjadi lunak,

melainkan semakin diperketat. Tentara Jepang sudah memperlihatkan sikap kekuasaannya dan tindakan kasarnya. Kehidupan ekonomi masyarakat Enrekang, khususnya di kampung-kampung berada dalam tingkat yang sangat buruk. Tekanan-tekanan terhadap rakyat makin lama makin berat dengan banyaknya kerja paksa. Kalau di daerah lain, rakyat dipaksa mengerjakan sawahnya untuk kepentingan sendiri dan kepentingan pendudukan Jepang. Akan tetapi di Enrekang tidak seperti itu, mereka tidak sempat bekerja atau bertani. Bukan karena tidak mau bertani atau tidak memiliki lahan pertanian, tetapi mereka mempunyai petak sawah atau lahan pertanian lainnya, namun untuk mengerjakan tanah-tanah itu tidak ada waktunya. Laki-laki dikerahkan secara paksa membuat benteng-benteng pertahanan tentara Jepang (Manta, wawancara, 12 Agustus 2018 dan hasil olahan data FGD, 14 Agustus 2018).

Laki-laki yang dikerahkan dalam kerja paksa untuk pembangunan bunker-bunker, kebanyakan yang ada di sekitar pembangunan bunker tersebut. Walaupun banyak juga yang didatangkan dari daerah lain, bahkan dari pulau lain sebagaimana yang disampaikan oleh Barbara, kerja *romusha* di Sulawesi Selatan kebanyakan didatangkan dari Jawa sekitar 70.000 orang. Para pekerja *romusha* ini memang tidak menyebut secara spesifik untuk pembangunan bunker-bunker tetapi lebih banyak dikerahkan untuk pengerjaan kehutanan, pertambangan dan lain-lain (Barbara. 1989: 95). Laki-laki yang tidak ikut kerja paksa, kadang memberanikan diri untuk bertani secara sembunyi-sembunyi. Namun, hasil pertaniannya tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Mereka sangat takut kalau dilihat oleh tentara Jepang, makanya bekerja secara sembunyi-sembunyi. Bekerja yang tidak maksimal, maka tentu saja hasil juga tidak maksimal. Tentara Jepang tidak pernah merasa peduli terhadap pertanian penduduk, baik persawahan maupun perkebunan, bahkan mereka secara sengaja merusak tanaman penduduk (Hasil olahan data

FGD, 14 Agustus 2018). Akan tetapi, tidak semua tanaman dirusak oleh tentara Jepang, khususnya perkebunan untuk kepentingan Jepang, yaitu perkebunan kopi dan kapas. Selain lahan pertanian atau perkebunan untuk kepentingan pendudukan Jepang, kebanyakan dirusak dengan cara mempergunakan kuda, sementara sikap masyarakat lebih banyak pasrah (Manta, wawancara, 12 Agustus 2018).

Kuda-kuda yang dipakai tentara Jepang merusak tanaman masyarakat adalah kuda-kuda milik tentara Jepang. Bahkan kuda-kuda milik Jepang lebih dipentingkan untuk diberi makan ketimbang memberi makan penduduk pada masa itu. Kuda-kuda dianggap lebih bermanfaat sebagai alat transportasi pasukan keamanan Jepang. Selain itu, kuda dianggap tidak membahayakan tentara Jepang. Kuda-kuda itu dimanfaatkan oleh tentara Jepang sebagai salah satu alat transportasi ke berbagai kampung-kampung di Enrekang sehingga kuda-kuda pada saat lapar mereka ditambatkan sesuka hatinya di tanaman masyarakat, bahkan mereka mencari kebun penduduk yang tanamannya bagus untuk makanan kuda-kudanya. Apa lagi jika tentara Jepang melakukan suatu perjalanan dan arah perjalanannya melewati tanaman para penduduk atau terhalang oleh pagar kebun penduduk, mereka tidak segan-segan membongkar pagar tersebut dan menjadikannya sebagai jalan, atau singgah secara sengaja memberi makan kudanya (Hasil olahan data FGD, 14 Agustus 2018).

Pada saat itulah kehidupan penduduk di daerah Enrekang berada dalam kondisi yang sangat buruk dan memprihatinkan. Kebutuhan pokok sehari-hari yang biasa dijual di pasaran seperti: garam, ikan, beras, dan sebagainya jarang ditemukan karena sengaja dihadang oleh tentara Jepang, lalu mereka mengambil untuk kepentingannya dan sisanya dibuang sehingga kebutuhan pokok tersebut tidak pernah sampai di Enrekang, terutama garam. Dianggap beruntung bila dapat mencicipi garam sekali dalam seminggu, garam pada masa itu dibuang di laut Pare-Pare oleh Jepang (Manta,

wawancara, 12 Agustus 2018). Para informan tidak mengetahui kenapa Jepang membuang garam itu ke laut, tetapi menurut beberapa anggota *Focus Groep Discussion* (FGD) termasuk Pak Manta sendiri mengatakan bahwa orang tua mereka percaya bahwa makan garam membuat orang menjadi kuat dan bersemangat. Barangkali itulah sebabnya garam dibuang ke laut oleh Jepang, akibatnya para penduduk sangat sulit mendapatkan garam dan kebutuhan pokok lainnya.

Terjadinya kelaparan penduduk karena para petani tidak berani bertani, mereka takut ditangkap lalu disiksa. Akan tetapi, ada juga penduduk yang memberanikan diri walaupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Mereka menganggap bahwa kalau tidak bertani akan tetap mati kelaparan sehingga lebih baik bertani secara sembunyi-sembunyi walau harus menggadaikan nyawa (Hasil olahan data FGD, 14 Agustus 2018). Kelaparan dan penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi karena pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan kebijakan untuk melakukan pengawasan secara ketat dan keras terhadap penyelundupan beras dari Sulawesi Selatan ke daerah lain dan daerah di sekitarnya, termasuk ke daerah yang sangat kekurangan beras (Barbara. 1989: 97). Pada masa penjajahan Belanda saja sangat susah makan nasi beras, apa lagi pada masa pendudukan Jepang. Jangankan nasi beras, nasi jagung saja sangat susah. Bagi penduduk yang memberanikan diri bertani, kadang masih dapat makan seperti jagung, tetapi itupun tidak selamanya karena sering gagal panen. Makan nasi jagung saja pada masa itu sudah dianggap mewah. Tetapi selain makan jagung, juga masyarakat Enrekang makan ubi sebagai makanan pokok, termasuk pisang muda yang diiris-iris untuk dijadikan makanan pokok, tetapi dicampur dengan ubi serta *sambe* (sagu) dan *sikapa* (sejenis umbi-umbian) yang dapat diperoleh di tengah hutan (Natsir. 2012: 80)

Kalau kita masuk di pasar-pasar tradisional Kota Makassar saat ini, kemudian pergi ke lapak-lapak sayuran, lalu bertanya

kepada penjualnya bahwa sayuran ini didatangkan dari mana, maka biasanya salah satu daerah yang disebutkan adalah Enrekang. Artinya bahwa Enrekang itu adalah salah daerah penghasil sayur-sayuran yang menyuplai Kota Makassar pada saat ini. Menurut catatan bukan hanya pada masa sekarang, tetapi sejak masa lampau (masa kerajaan), termasuk pada masa pendudukan Jepang. Kenyataannya, pada masa pendudukan Jepang, masyarakat Enrekang sangat sulit untuk dapat makan sayur-sayuran. Produksi petani sangat terbatas dan hasilnya hanya diperuntukkan untuk kebutuhan penguasa Jepang, masyarakat hanya diperbolehkan memasak sayur daun kelor saja dan sayur dari kacang-kacangan sangat tidak diperbolehkan. Polisi urusan pertanian akan memberikan laporan kepada tentara Jepang apabila melihat ada tanaman kacang-kacangan, dan jika terbukti maka hukumannya sangat keji (Sritimuryati. 2013: 48).

Demikian juga kebutuhan pakaian pada masa pendudukan Jepang sangat sulit ditemukan, terutama masyarakat yang tinggal di pegunungan-pegunungan. Mereka hanya memakai penutup badan yang terbuat dari kulit pohon kayu, yang dikupas dan dilepas dari batangnya, kemudian dibuat sedemikian rupa untuk dijadikan penutup badan. Yang paling menyedihkan dan paling melukai hati orang Enrekang adalah kebiadaban tentara Jepang yang memperlakukan perempuan yang bukan muhrimnya sebagai pemuas nafsu birahinya (Manta, wawancara, 12 Agustus 2018). Tentara Jepang berbuat seperti itu kepada perempuan karena pemerintah Pendudukan Jepang tidak melarangnya, tetapi bahkan sengaja membiarkannya. Perempuan yang menjadi korban pelampiasan nafsu tentara Jepang, kebanyakan perempuan yang berhasil ditipu, diculik dan atau dipaksa oleh tentara Jepang.

Para laki-laki lebih banyak dipekerjakan sebagai pembudidaya tanaman kapas dan kopi, sementara perempuan lebih banyak dipekerjakan sebagai pemetik dan penenun. Bekerja ditempat itu sebagai bagian dari

pemaksaan, ada yang diwajibkan bekerja selama 10 hari dan ada yang 15 hari. Jadi rakyat pada masa itu harus menyerahkan tenaganya secara cuma-cuma dengan pemaksaan karena tidak ditanggung makanan. Perempuan yang banyak dipekerjakan di bagian pemetikan kapas dan di bagian penenungan kain, tetapi terkadang diperlakukan secara bejat oleh tentara Jepang menjadi perempuan penghibur/pemuas nafsu birahi tentara Jepang. Kehormatan orang-orang tua dulu dinodai oleh tentara-tentara Jepang. Banyak anak perempuan yang diperlakukan seperti itu, apa lagi jika kelihatan cantik-cantik, dan muda-muda. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, perempuan yang ada suaminya, juga diperlakukan bajet paksa seperti itu (Manta, wawancara, 12 Agustus 2018).

Terkait dengan perempuan yang dipaksa sebagai pemuas nafsu birahi oleh tentara Jepang dalam berbagai sumber disebut dengan istilah *jugun ianfu*. Salah satu kajian yang dimaksud adalah kajian Dimar Kartika Listiyanti tentang *jugun ianfu* pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Dalam kajian itu menguraikan bahwa *Jugun Ianfu* merupakan perempuan yang dipaksa untuk menjadi pemuas kebutuhan seksual tentara Jepang yang ada di Indonesia dan juga di negara-negara jajahan Jepang lainnya pada masa Perang Dunia II. Kecenderungan *Jugun Ianfu* adalah mereka merupakan wanita yang berasal dari wilayah jajahan yang berhasil dikuasai oleh Jepang (Listiyanti. 2008: 14). Masalah perempuan penghibur nafsu birahi tentara Jepang pada masa Perang Dunia II bukanlah dianggap sebagai masalah genting atau bejat bagi Jepang sebab dunia pelacuran di Jepang adalah hal yang biasa.

Dunia pelacuran dikenal sejak lama oleh Jepang, terutama sejak terbukanya politik isolasi Jepang, tepatnya setelah Restorasi Meiji, yaitu berdirinya Jepang moderen pada tahun 1868. Pada masa itu banyak perempuan Jepang keluar mencari pekerjaan, dan salah satu pekerjaan yang dimaksud adalah pelacuran. Sehingga *jugun ianfu* mendapat dukungan secara tidak langsung dari Kementerian

Peperangan Jepang pada masa Perang Dunia II. Kementerian tersebut menyebutkan akan mempertimbangkan perlunya *jugun ianfu* sebagai suatu rencana yang efektif untuk memelihara kedisiplinan militer dan mencegah penyakit kelamin. *Jugun ianfu* yang dilakukan oleh Jepang banyak terdapat tipu daya terhadap perempuan. Bahkan banyak juga yang diculik dari keluarganya untuk dijadikan perempuan *jugun ianfu*. Sehingga dapat dikatakan bahwa *jugun ianfu* atau pelacuran yang dilakukan oleh Jepang adalah suatu bentuk pemaksaan terhadap kaum perempuan, demi kepentingan tentara Jepang (Listiyanti. 2008: 16-30).

Kajian Listiyanti itu pula menyebutkan bahwa Markas Besar Tentara Jepang Pasifik Selatan yang berada di Rabaul, Papua Nugini pernah meminta kepada Markas Besar Tentara Jepang di Taiwan untuk mendapatkan *jugun ianfu*, kemudian mengirim mereka ke Borneo (kalimantan) sebanyak 70 orang. Tetapi memasuki tahun 1943 sudah terjadi serangan besar-besaran dari pihak Sekutu, sehingga pengiriman *jugun ianfu* dari Jepang, Cina, dan Korea ke Asia Tenggara semakin sulit, maka sebagai gantinya para gadis Indonesia dikirim ke garis depan sebagai penghibur atau *jugun ianfu*. Kim Hak Sun adalah seorang *jugun ianfu* asal Korea yang pertama bersedia menceritakan kisah hidupnya kepada dunia luas untuk menuntut pemerintah Jepang melalui Tokyo District Court pada 6 Desember 1991 secara legal, dan banyak orang yang mengikutinya. Demikian juga setelah Perang Dunia II semakin banyak laporan terkait dengan *jugun ianfu* di berbagai daerah di Indonesia. Di Sulawesi Selatan, tepatnya pada Juni 1946, terdapat laporan dari Pare-Pare yang melaporkan banyaknya korban *jugun ianfu* oleh tentara Jepang di Sulawesi Selatan (Listiyanti. 2008: 39-51).

Perlakuan tentara Jepang terhadap kaum perempuan Indonesia sering disebut sebagai salah satu pendorong terjadinya pemberontakan. Contohnya pemberontakan di Blitar, karena ketidakmampuan mereka akan sikap tentara Jepang terhadap kaum perempuan. Perlakuan

Jepang terhadap perempuan Indonesia sudah melampaui batas. Namun besarnya kekuatan Jepang pada waktu itu, para orang tua yang menyerahkan anak gadisnya kepada pihak Jepang sebagian besar tidak berdasarkan atas kerelaan, melainkan atas ketakutan mereka kepada pihak Jepang. Tentara Jepang tidak segan untuk menghukum dengan keji penduduk yang mereka anggap bersalah dimuka umum (Listiyanti. 2008: 42). Demikian juga yang terjadi di Enrekang, ada beberapa perempuan yang diperlakukan keji, tetapi mereka tidak mampu berbuat apa-apa karena ketakutan. Walaupun di Enrekang tidak disebutkan ada rumah bordis khusus untuk *jugun ianfu*, tidak sedikit perempuan Enrekang dijadikan pemuas nafsu birahi tentara Jepang. Alasan perlakuan keji tentara Jepang itu pula yang menyebabkan orang Enrekang melakukan perlawanan sengit yang berkepanjangan pada masa NICA dibanding dengan daerah lain karena tidak mau lagi merasakan kekejian pada masa pendudukan Jepang (Manta, wawancara, 12 Agustus 2018)

Kekejaman dan kebejatan pada masa pendudukan Jepang bukanlah pendapat atau pandangan yang baru muncul melainkan kebanyakan pengakuan masyarakat di semua daerah membenarkan hal itu. Banyak juga informan yang memberikan pengakuan bahwa lebih terasa penjajahan pada masa pendudukan Jepang yang hanya 3,5 tahun, dibanding pada masa penjajahan Belanda yang ratusan tahun. Tingkah laku tentara Jepang lebih baik daripada tingkah laku tentara Belanda, karena perempuan masih banyak yang dihargai dan dihormati. Perempuan juga pada masa itu masih banyak yang dapat memakai sarung, tetapi pada masa Pendudukan Jepang lebih banyak memakai karum goni yang dibelah baru dipakai sebagai selimut (Hasil olahan data FGD, 14 Agustus 2018).

Sistem kerja paksa pada masa pendudukan Jepang di Anggeraja adalah sistem kerja paksa dalam bentuk kelompok, misalnya ada pekerjaan mengangkat batu, maka harus dikerjakan secara berkelompok dan kalau

tidak bisa diangkat oleh kelompok itu, maka anggota kelompoknya dikurangi satu orang. Celakanya, semakin tidak mampu diangkat, maka semakin kurang anggota kelompoknya, dan jika tidak dapat dikerjakan atau diselesaikan sesuai dengan target, akan dihukum berat oleh tentara Jepang (Manta, wawancara, 12 Agustus 2018). Pekerjaan dengan beban berat, memang lebih banyak diperankan oleh kaum laki-laki secara paksa, seperti mengerjakan lahan-lahan pertanian, perkebunan jarak, kapas dan membuat benteng-benteng pertahanan sebagaimana yang dilakukan di Bira, Enrekang, Rantepao, Palopo dan lain-lain. Di samping mempekerjakan secara paksa kaum laki-laki, pihak Jepang juga sering mengambil produksi penduduk tanpa mempertimbangkan apakah penduduk dapat makan kalau diambil. Tindakan Jepang itu betul-betul dapat mematikan rakyat, dan juga mematikan rasa simpati, termasuk hormat rakyat yang pernah diberikan kepada Jepang (Kadir. 1984: 77)

Perlakuan keji lain yang dilakukan pada masa Pendudukan Jepang adalah pembantaian atau pembunuhan kepada para penggali tanah untuk menimbung senjata-senjata Jepang menjelang kekalahannya pada Sekutu. Banyak penyimpanan senjata yang dibuat di Enrekang dengan cara menanam ke tanah, kemudian orang-orang yang membuat gudang senjata itu langsung ditembak mati setelah selesai penimbunan, agar mereka tidak membeberkan kepada orang lain. Kemudian Jepang pada saat kalah dari Sekutu, Jepang tidak membawa pergi senjata itu. Alasan Jepang tidak membawa pergi senjatanya karena Jepang masih berusaha dan berjuang untuk kembali. Jadi nanti kalau Jepang datang kembali, mereka mengambil senjata itu untuk dipakai menyerang Sekutu. Senjata Jepang yang banyak ditimbung itu sampai sekarang belum ditahu apakah sudah ditemukan atau belum (Manta, wawancara, 12 Agustus 2018)

Perlakuan kejam dan keji oleh tentara Jepang itu karena semakin stres, hampir dikalahkan oleh Sekutu, makanya semakin

beringas. Banyak orang Enrekang yang meninggal karena kekejaman itu, terutama yang menggali penimbunan senjata Jepang. Termasuk para pekerja bunker-bunker atau orang-orang yang dianggap mau melawan, diancam hukum dan dibunuh secara keji oleh tentara Jepang. Terkait dengan adanya ancaman pembunuhan itu, ada kasus pada waktu itu. Orang-orang yang dituduh dan dianggap mau melawan langsung ditangkap oleh tentara Jepang untuk dihukum tembak. Kemudian, mereka dimasukkan ke bunker-bunker, rencananya akan disuruh keluar satu per satu untuk ditembak mati. Namun sebelum aksi pembantaian itu dilakukan, secara tiba-tiba ada salah seorang dalam bunker bernyanyi lagu kebangsaan Jepang dengan sangat merdu (informan juga ikut menyanyikan lagu Jepang itu dengan merdu pada saat diwawancarai, mencontohkan orang yang ia ceritakan). Kemudian rencana penembakan itu tiba-tiba dihentikan, tentara Jepang terhenyut dan merasa bahwa orang-orang yang ada di dalam bunker masih sangat menghargainya (Jepang). Sehingga tidak seorang pun mati ditembak dalam kasus itu (Manta, wawancara, 12 Agustus 2018)

PENUTUP

Pendudukan Jepang di Indonesia pada umumnya dan Sulawesi Selatan pada khususnya bukanlah pendudukan yang dilakukan secara tiba-tiba melainkan sudah dilakukan dengan perencanaan jauh sebelumnya. Pada abad XVII saja sudah banyak orang Jepang di Indonesia yang mengembang tugas sebagai pedagang. Orang-orang Jepang terus meningkat kedatangannya ke Indonesia, dan sangat tajam peningkatannya pada abad XIX dan XX setelah pembukaan “Politik Isolasi” Jepang melalui restorasi Meiji. Sebelum Jepang datang ke Indonesia sebagai penjajah, Jepang telah melakukan serangkaian usaha-usaha untuk menarik simpati orang Indonesia. Emigran-emigran Jepang tersebut bertindak sebagai propaganda untuk meyakinkan orang Indonesia sehingga mereka sangat muda

diterima oleh masyarakat setelah pendudukan, termasuk di Enrekang. Kemudian propaganda itu berlanjut terus, walaupun propaganda itu mengalami perubahan diksi atau narasi sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai oleh Jepang berdasarkan waktunya.

Keberhasilan propaganda Jepang pada prapendudukan, mampu meyakinkan kaum nasional dengan janji masa depan kemerdekaan Indonesia. Keyakinan orang Indonesia itu, juga bukan datangnya secara tiba-tiba, melainkan melalui proses waktu yang cukup panjang sebagaimana yang dilakukan oleh tuan-tuan toko Jepang di Sulawesi Selatan. Setidaknya dibuktikan dengan keberhasilan Jepang mengalahkan Rusia, Amerika Serikat di Pasifik dan Belanda di Indonesia, serta perilaku baik tuan-tuan toko Jepang. Kemudian Indonesia dapat diyakinkan dengan pengibaran bendera nasional “Merah Putih” dan lagu kebangsaan “Indonesia Raya” disandingkan dengan bendera dan lagu kebangsaan Jepang dengan slogan “Jepang-Indonesia sama”. Namun harus juga dimaknai ganda bahwa ada kemungkinan kemerdekaan akan diraih atas bantuan Jepang, atau kemerdekaan hanyalah sebuah ilusi jika Jepang menang dalam perang Pasifik. Dua-duanya tidak dalam kepastian, namun yang pasti Indonesia sudah merdeka dengan banyak belajar dari pengalaman penjajahan Belanda dan Jepang.

Enrekang sebagai salah daerah yang mengalami kekejaman dan kebiadaban tentara pendudukan Jepang. Mereka menjadi korban akibat propaganda Jepang yang cukup masif sebelum dan awal-awal pendudukan. Terlebih dahulu mereka dihipnotis dan dibius dengan cara memberi atau membagi-bagikan makanan mewah yang jarang mereka temukan dan rasakan. Setelah mereka sudah berada dalam perangkap, barulah mereka dieksploitasi di berbagai bidang. Secara ekonomi mereka dieksploitasi melalui penanaman kopi, kapas, penenungan kain dan lain-lain; kaum laki-laki lebih banyak dieksploitasi dalam pengerahan tenaga kerja paksa untuk membangun bangker-bangker,

sementara kaum perempuan lebih banyak dieksploitasi untuk mengerjakan pemetikan kapas dan penenungan. Kaum perempuan juga banyak diperlakukan secara bajet oleh tentara pendudukan Jepang sebagai pemuas nafsu birahinya. Kekejaman lain Jepang di Enrekang adalah pembantaian para pekerja yang menggali penyimpanan senjata-senjata Jepang menjelang kekalahannya dengan Sekutu.

Parahnya kekejaman dan kebiadaban tentara pendudukan Jepang di Enrekang sangat terasa oleh masyarakat juga karena Enrekang menjadi pusat pertahanan Jepang di Sulawesi Selatan. Dijadikannya sebagai pusat pertahanan karena letak geografisnya, dan tentu menjadi konsekuensi logis dari kebijakan untuk mengerahkan banyak tenaga paksa di sana, baik secara militer maupun secara ekonomi, serta akibat-akibat yang ditimbulkannya. Tidak sedikit yang menjadi korban atas kepekasannya karena mereka tidak dapat melarikan diri. Akan tetapi tidak sedikit pula yang nekat melakukan perlawanan diakhir pendudukan Jepang karena mereka sadar akan tetap mati, jadi lebih baik melawan penjajah. Penderitaan masyarakat Enrekang atas kekejaman Jepang, berbanding terbalik di kota-kota, banyak diberitakan bahwa Jepang sangat melunak pada saat menjelang kekalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Taufik. (editor). 1990. *Sejarah Lokal di Indonesia: Kumpulan Tulisan*, Yogyakarta, LIPI dan Gadjah Mada University Press
- Dian, Ida. 1991. *Pendudukan Jepang di Anggeraja (1943-1945)*, Makassar, Skripsi Pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin
- Djoened, Marwati. dkk. 1990. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI*, Jakarta : PN. Balai Pustaka
- Gottschalk, Louis. 1985. *Mengerti Sejarah*, yang diterjemahkan oleh Nugroho Notosusanto, Jakarta, Universitas Indonesia Press
- Kadir, Harun. dkk. 1984. *Sejarah Perjuangan Republik Indonesia di Sulawesi Selatan (1945- 1950)*, Ujung Pandang, Kerjasama Bappeda Tingkat I Provinsi Sulawesi Selatan dengan Universitas Hasanuddin
- Kartodidjo, Sartono. dkk. 1977. *Sejarah Nasional Indonesia jilid VI: Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (1942-sekarang)*, Jakarta, Balai Pustaka
- . 1985. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia: Suatu Alternatif*, Jakarta, Gramedia
- Listiyanti, Dimar Kartika. 2008. “Jugun Lanfu Pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia”, Jakarta, Tesis Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia
- Poelinggomang, Edward L. dkk. 2005. *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid II*, Makassar, Balitbangda Propinsi Sulawesi Selatan
- Ricklesf, M.C. 1995. *Sejarah Indonesia Moderen*, cetakan kelima, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press
- Sitonda, Muhammad Natsir. 2012. *Sejarah Massenrempulu Jilid I*, Makassar, Tim Yayasan Pendidikan Muhammad Natsir dan bekerjasama dengan Pemda Kabupaten Enrekang
- Soejiti, Irawan. 1982. *Sejarah Pemerintahan Daerah Indonesia I*, Jakarta, PT Gramedia
- Sritimuryati. 2013. *Sejarah Enrekang*, Makassar, De La Macca
- Sillars Harvey, Barbara. 1989. *Pemberontakan Abdul Kahar Muzakkar : Dari Tradisi ke DI/III*, Jakarta, PT. Pustaka Utama Grafiti
- Widiatmoko. 2010. “Film Sebagai Media Propaganda Politik di Jawa Pada Masa Pendudukan Jepang 1942- 1945”, Surakarta, Skripsi Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret
- Focus Groep Discussion (FGD)*, 14 Agustus 2018 di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Enrekang yang diikuti sebanyak 15 orang peserta
- Wawancara dengan bapak Manta (pengsiunan guru) pada 12 Agustus 2018 di Enrekang